BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Urgensi Jawa Barat pada masa kolonial menjadikan Pemerintah Belanda enggan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebelum dicetuskannya proklamasi kemerdekaan, Belanda sudah menyusun rancangan agar tanah jajahan tidak lepas begitu saja, khususnya Jawa Barat. Rancangan tersebut berupa pengolahan arsip-arsip untuk memberikan penerangan tentang sejarah pemerintahan Hindia-Belanda. Pengolahan arsip-arsip tersebut ditujukan sebagai bukti tertulis akan adanya sistem pemeirntahan Hindia-Belanda di *Nederlandcsh-Indie* (Indonesia). Pengolahan arsip-arsip tersebut lebih-lebih secara aktif digencarkan pada tahun 1926-1929 ketika munculnya tuntutan Indonesia Merdeka.[1]

Hal tersebut terbukti dengan adanya kumpulan arsip *Memorie Van Overgave* di Jawa Barat yang tersusun selama dua dasawarsa pra-kemerdekaan. Dari *Memorie Van Overgave* itu, Belanda mampu mendapatkan kepercayaan dari dunia Internasional akan kepemerintahannya di Indonesia. Isi dari *Memorie Van Overgave* itu sendiri memuat laporan-laporan tentang kebijakan politik, sosial, maupun ekonomi dari aparat birokrasi pemerintah Belanda yang menjabat. Oleh karena itu,

[1] Sulistyo Basuki, dkk. *ANRI: Dalam Gerakan Langkah 50 Tahun Indonesia Merdeka*. (Jakarta: ANRI, 1996), pp. 14-16.

Belanda sebagai sekutu Inggris dalam Perang Dunia II masih diakui sebagai penguasa resmi di Indonesia oleh dunia internasional.[2]

Demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang didukung rakyat, dilakukanlah berbagai upaya diplomasi oleh pemerintahan RI kepada Belanda dengan tujuan untuk mencapai pengakuan dan menjalin suatu kerjasama yang disepakati. Serangkaian perundingan antar dua negara tersebut sudah terjalin sejak diadakannya pertemuan pertama pada tanggal 17 Nopember 1945 di Jakarta antara Van Mook dari pihak Belanda dengan Sjahrir Wakil RI serta Christison sebagai orang ketiga yang netral dari Inggris.[3]

Melalui proses panjang selama perundingan antara Indonesia dengan Belanda tersebut, pada akhirnya mendapati kesepakatan antara delegasi Indonesia dengan delegasi Belanda pada tanggal 15 Nopember 1946 yang diadakan di Jakarta dan Linggarjati, Kabupaten Kuningan. Kesepakatan tersebut merumuskan ketetapan-ketetapan yang secara pokok berisi; (1) Pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia secara *de facto* atas Jawa, Madura dan Sumatera, (2) Pemerintahan Indonesia dan Belanda bekerja sama untuk membentuk suatu Uni Indoneseia-Belanda, (3) Perjanjian ini menjamin bahwa kedua

---

[2] Yuniarti, *Konferensi Meja Bundar (KMB)*, (Jakarta: ANRI, 2004), p.1.

[3] Mona Lohanda, dkk. *Sejarah Peralihan Pemerintahan RIS ke RI: Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1992), p: 10.

pihak akan mengurangi kekuatan pasukannya masing-masing. Dan akhirnya, persetujuan Linggarjati yang berisi 17 pasal itu ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947.[4]

Dari perjanjian tersebut, pasukan Belanda yang bersenjatakan tank dan dibantu oleh pasukan udara yang kuat di tanggal 21 Juli 1947 langsung menyusup ke dalam wilayah Republik Indoneseia. Dalam dua minggu, Belanda berhasil menguasai hampir semua kota besar dan kota-kota penting di Jawa Barat (tidak termasuk Banten). Penyerbuan Belanda berpusat pada Karesidenan Bogor, Priangan, dan Cirebon. Di Jakarta Barat, Belanda hanya memperluas kedudukannya sejauh 10-15 km. Sedangkan Sukabumi dan Pelabuhan Ratu dikuasainya, serta memperoleh separuh kendali atas rantai komunikasi utama antara kota-kota tersebut.[5] Menurut Belanda, penempatan pasukan-pasukan Belanda di Jawa Barat bukanlah bentuk dari "agresi" melainkan bentuk keamanan dan ketertiban pada wilayah Uni Indonesia-Belanda.[6]

Keberadaan Belanda di Jawa Barat sendiri merupakan imbas dari penafsiran istilah-istilah pokok pada Konverensi Linggarjati, yakni 'kerja sama' dan 'federasi'. Pemerintah Belanda mennggap bahwa kerja sama dengan Republik tetap

---

[4] Mona Lohanda, dkk. *Sejarah Peralihan Pemerintahan...*, p:15-16.

[5] Rahayu Permana, *Kyai Haji Sjam'un (1883-1949): Gagasan Dan Perjuangannya*, (Yogyakarta: Eja_Publisher), p: 100.

[6] George McTurnan Kahin, *Nasionalisme Dan Revolusi Indonesia*, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), p: 274-278.

mengandung makna kelanjutan kepemimpinan Belanda dan tanggungjawab tunggal atas pembentukan Republik Indonesia Serikat. Belanda juga menafsirkan bahwa 'federasi' di RI ditetapkan sebagai bagian dari kedudukan politik Belanda. Oleh karena itu, Belanda mampu mendominasi struktur politik dan badan-badan yang menjadi unsur pokok pemerintahan RIS, karena mereka menganggap bahwa merekalah yang secara *de jure* berwenang untuk pembentukan negara-negara bagian baru lainnya.[7]

Keputusan Belanda ini mengakibatkan kerugian besar bagi Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan membawa bukti bahwa Belanda telah menyalahi perjanjian Linggarjati, Sjahrir mendesak kepada dewan keamanan internasional untuk membentuk sebuah badan netral (*arbirtrage*) agar menyelesaikan persengketaan. Karena itu pada tanggal 27 Agustus 1947 dewan keamanan memutuskan untuk membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Masing-masing pihak memilih pendampingnya; Indonesia memilih Australia sedangkan Belanda memilih Belgia. Untuk selanjutnya Belgia dan Australia memilih Amerika sebagai pihak ketiga dalam Komis Tiga Negara dan terciptalah perundingan pada tanggal 8 Desember 1947 diatas kapal Renville. Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Abdul Kadir Widjojoatmojo,

---

[7] George McTurnan Kahin, *Nasionalisme Dan Revolusi Indonesia*, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), p: 289-290.

seorang Indonesia yang pro-Belanda. Naskah persetujuan Renville ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. [8]

Persetujuan tersebut mencangkup delapan pokok dasar: enam pasal perjanjian penghentian permusuhan, peraturan umum gencatan senjata, penetapan daerah yang dikosongkan militer, dan sebagainya. Pada dasarnya Republik mengalah terhadap status militer Indonesia demi mematuhi keputusan diplomasi. Pasukan-pasukan yang telah berbulan-bulan menjalankan perang rakyat akan ditarik, karena menurut perhitungan pemerintah daerah-daerah yang dikosongkan dalam waktu singkat akan didapat kembali melalui perundingan dan pemilihan di bawah pengawasan KTN.[9]

Akan tetapi, persetujuan Renville ternyata tidak juga membawa kedamaian. Belanda sudah tidak menghiraukan Persetujuan Renville karena merasa aman setelah kantong-kantong geriliya dikosongkan. Belanda lalu melakukan offensif politik dengan membentuk Dewan Federal Sementara yang dipimpin oleh kaum koorperator Indonesia tanpa sepengetahuan RI. Akibat dari persetujuan Renville juga sangat merugikan pihak militer Indonesia. Pada saat itu posisi para pejuang dalam kondisi yang baik dengan mengambil inisiatif penyerangan. Namun prajurit anggota Divisi Siliwangi yang berjumlah 22.000 personil

---

[8] Mona Lohanda, *Sejarah Peralihan Pemerintah RIS Ke Ri: Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Proyek Inventaris Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986), p: 21.

[9] Abdoel Fattah, *Demiliterasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer '45..,* (Jakarta; LKiS, 2005), p:66.

mendapatkan perintah untuk "hijrah" ke Jawa Tengah. Perintah hijrah ini harus mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1948 dan sudah harus selesai pada tanggal 22 Februari 1948.[10]

Sementara itu, Permasalah yang diperoleh dari kesepakatan Renville dalam segi pemerintahan adalah terbentuknya unit negara-negara di Indonesia. Dengan RI termasuk bagian dari negara-negara federasi RIS,[11] dengan Pasundan sebagai salah satu negara didalamnya. Kerangka sistem politik federal tersebut direkayasa oleh Van Mook yang menjabat sebagai Letnal Gubernur Jendral Hindia Belanda dan kepala NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*). Tujuan Belanda adalah tetap menguasai kembali Indonesia. Caranya ialah memecah-mecah Indonesia dan mekanismenya ialah memerintah secara tidak langsung (*indirect rule*) melalui negara-negara federal (*federal state*) yang dibentuk Belanda mengikat negara-negara itu dalam sebuah federasi (serikat) lalu membentuk Uni Indonesia – Belanda. Oleh karenanya, Belanda menggencarkan siasatnya pada daerah bekas jajahan *Nederlend-Indie* dan mendukung adanya gerakan pembentukan Negara Pasundan oleh PRP (Partai Rakyat Pasundan) dari Suria Kartalegawa yang

---

[10] Adeng, dkk. *Peranan desa dalam perjuangan kemerdekaan: studi kasus keterlibatan beberapa desa di daerah bandung dan sekitarnya tahun 1945-1949*. (Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995), p: 148.

[11] Mona Lohanda, dkk. *Sejarah Peralihan Pemerintahan RIS ke RI: Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1992), p: 15.

didirikan pada tanggal 20 November 1946. Sehubungan dengan Negara Pasundan ini, terdapat dua bentuk yang membendakan waktu proses kelahirannya. Pertama Negara Pasundan yang di proklamasikan oleh Suria Kartalegawa yang didukung oleh Belanda untuk menjadi Negara pada bulan April dan Mei 1947.[12] dan kedua ialah Negara Pasundan yang proses pembentukannya melaui konferensi di Jawa Barat. Tahap penyelenggaraan konferensi itu terjadi dalam pelaksanaan Konferensi Jawa Barat I (13-18 Oktober 1947), Konferensi Jawa Barat II (16-20 Desember 1947), dan Konferensi Jawa Barat III (23 Februari – 5 Maret 1948).[13]

Jawa Barat yang lebih dikenal dengan sebutan *West Java* pada masa Hindia-Belanda, memang merupakan wilayah yang dengan sendirinya mampu untuk berdiri sendiri. Selain karena posisi pelabuhan maritimnya yang strategis, struktur perekonomian yang dihasilkan pun mampu menunjang devisa dua negara dan distributor dunia. Faktanya pada dua dasawarsa terakhir pra-kemerdekaan, Jawa Barat merupakan *gemeente* (kota praja) yang dibentuk pertama kali di Hindia-Belanda, sehingga jumlah orang Belanda dan Eropa yang bedomisili disana sudah mendominasi ditambah dengan dibangunannya berbagai infrastruktur berupa gedung pemerintahan, hotel, perkebunan dan

---

[12] Helius Samsudin, dkk. *Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan*, (Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1992), p: 28.

[13] Buku *Penelusuran Arsip Sejarah Negara Pasundan; Kegiatan Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis Tahun Anggaran 2014* (oleh: Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat), p. 11-16.

pabrik milik Belanda, hingga didirikannya sekolah *Hollands Inlandsche Kweekschool* di Bandung dan beberapa sekolah Belanda di daerah Jawa Barat lainnya.[14] Dengan berdirinya negara pasundan di bawah pengawasan Pemerintah Belanda, maka pihak Wali Negara yang terpilih setuju untuk mengurus pengembalian pabrik-pabrik dan *onderneming-onderneming* kepunyaan bangsa asing pada pemiliknya.[15]

Oleh karena itu, target Belanda selanjutnya dalam menguasai bekas wilayah jajahannya dengan membentuk negara federal di Jawa Barat seyogyanya memiliki berbagai peristiwa yang di rasa penting oleh penulis untuk dikaji. Dengan demikian, pegkajian ini akan menempatkan persoalan utamanya pada peristiwa sejarah atas **Peran Republik Indonesia Dalam Pembubaran Negara Federal Pasundan Di Jawa Barat Tahun 1947-1950.**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah disebutkan, untuk mempermudah penulis agar tidak terlalu luas dalam pembahasan maka dibuatlah pembatasan bagi penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana Motif Pembentukan Pemerintahan Negara Pasundan Di Jawa Barat?
2. Bagaimana Mekanisme Birokrasi Pemerintahan Negara Pasundan?

---

[14] Helius Samsudin, dkk. *Menuju Negara Kesatuan...*, p, 30.

[15] Agus Mulyana. *Negara Pasundan 1947-1950: Gejolak Menak Sunda Menuju Integrasi Nasional.* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015).p. 68.

3. Bagaimana Responsif Nasionalisme Golongan Republiken Dalam Mendukung Pembubaran Negara Pasundan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Motif Pembentukan Pemerintahan Negara Pasundan Di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui Mekanisme Birokrasi Pemerintahan Republik Pasundan.
3. Untuk mengetahui Responsif Nasionalisme Golongan Republiken Dalam Mendukung Pembubaran Negara Pasundan.

D. Kerangka Pemikiran

Indonesia resmi berdiri sebagai negara yang didukung oleh rakyat sejak dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Roger H. Soltau mendefinisikan negara sebagai agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Salah satu dasar pembentukan negara menurut pandangan psikologis ialah adanya sifat Nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu perasaan subyektif kelompok manusia terhadap cita-cita serta aspirasi mereka bersama yang hanya dapat tercapai jika mereka tergabung dalam satu negara.[16]

[16] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), p. 48-53.

Dari sifat nasionalisme inilah, segala bentuk upaya memecah belahj kesatuan Negara Indonesia serta adanya campur tangan kolonialisme pasti akan mendapat perlawanan keras dari berbagai elemen yang mendukung kedaulatan Negara Indonesia seperti rakyat, aparat dan lembaga keamanan negara itu sendiri.

Dalam teori pemerintahan, secara garis besar dikenal ada dua model formasi negara, yaitu model negara federal dan model negara kesatuan. Secara etimologis, kata "federal" berasal dari bahasa Latin *feodus*, artinya liga. Model negara federal berangkat dari asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan pada dirinya masing-masing, dan kemudian bersepakat membentuk serta menggabungkan diri untuk menjadi suatu negara bagian.[17] Akan tetapi, model negara federal yang coba diterapkan pemerintah Belanda di wilayah Indonesia memiliki sifat memaksa karena dalam proses pembentukannya tidak melibatkan suara rakyat dan mendapatkan pertentangan keras dari rakyat di wilayah Indonesia itu sendiri.

Strategi Belanda dalam upayanya mendirikan Negara Federal tidak lain karena adanya periode Kebangkitan Nasional pada dasawarsa pertama abad ke-20. Kesadaran akan cita-cita untuk meningkatkan taraf kehidupan bangsa menjadikan para kaum pengerak Kebangkitan Nasional memiliki konsep *imagined political community* dengan menghimpun rasa kesatuan akan

---

[17] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik…*,p. 230.

kebangsaan yang dirumuskan dalam Ikrar Sumpah Pemuda dan mengatasnamakan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang seyogyanya harus diperjuangkan.[18]

Sesuai dengan pendapat Sartono, bahwa dasawarsa ketiga abad ke-20 bagi Indonesia merupakan periode mobilisasi politik massa yang bercorak radikal serta penuh kekerasan. Hal itu dikarenakan sumber-sumber daya pergerakan nasional telah tersedia, seperti kepemimpinan, ideologi massa sebagai pendukung, dan organisasi-organisasi sebagai wahana komunikasi. Namun, ada faktor-faktor minus yang menghambatnya, antara lain adalah adanya konflik antar dan dalam organisasi, persaingan antara pemimpin, pluralitas masyarakat Indonesia dengan golongan-golongan politiknya, serta adanya kesenjangan antara elite dan massa menjadi kunci emas yang dengan mudah dipergunakan oleh pemerintah kolonial untuk menciptakan situasi yang penuh konflik agar dapat saling melemahkan dalam tubuh Kesatuan Indonesia.[19]

Oleh karena itu, pada dasawarsa keempat abad ke-20 tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 masih ditemukan konflik yang dipelopori oleh Kolonial Belanda dengan salah satu upayanya adalah mendirikan Negara Federal, dengan Negara Pasundan sebagai wujud

---

[18] Benedict Enderson. *Komunitas-Komunitas Terbayang*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), p. xxxi.

[19] Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018), p. 181-182.

kedaulatan atas keberadaan pemerintahan Belanda sebagai sponsor utamanya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis menggali informasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik itu mengenai kekurangan ataupun kelebihannya. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian atau karya ilmiah yang mempunya relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Agus Mulyana pada tahun 2015 dengan judul Negara Pasundan 1947-1950: Gejolak Menak Sunda Menuju Integrasi Sosial, membahas tentang studi kaum elite di Jawa Barat yang secara teoritis memiliki kedekatan sosial-politik dengan Belanda. Karya Agus Mulyana berisikan pola budaya para kaum menak yang terlibat dalam mendukung Negara Pasundan bentukan Belanda. Dalam penelitian Agus Mulyana tidak mencantumkan mengenai adanya faktor ekonomi yang menjadikan Belanda bersikukuh mempertahankan wilayah Jawa Barat. Pada penelitian ini juga hanya berfokus pada peristiwa Negara Pasundan yang berada di wilayah Priangan saja, dan tidak membahas keberlangsungan birokrasi dari pemerintahan Negara Pasundan yang diresmikan pada 24 April 1948.

Buku karya Helius Sjamsudin dkk, dengan judul Menuju Negara Kesatuan Negara Pasundan yang diterbitkan oleh Diroktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional pada tahun 1992 memberikan informasi mengenai sejarah berdirinya Negara

Pasundan, baik itu pada saat proklamasi Kartalegawa di tanggal 4 Mei 1947 ataupun informasi mengenai struktur pemerintahan Negara Pasundan yang telah resmi berdiri. Dalam penyusunan buku ini didapati kondisi geografi dan demografi pada wilayah Jawa Barat. Namun dalam penyusunannya peneliti Helius Sjamsudin dkk, tidak mencantumkan motif ekonomi, sosial, maupun politik dalam mengekspresikan faktor utama pembentukan Negara Pasundan. Peneliti Helius Sjamsudin dkk, juga tidak mencantumkan informasi mengenai mekanisme birokrasi yang sedang berlangsung pada pemerintahan Negara Pasundanan, serta juga tidak mencantumkan data mengenai responsif masyarakat atas dampak dari peristiwa berdirinya Negara Pasundan tersebut.

Interpretasi data yang penulis deskripsikan dalam penyusunan skripsi ini mengenai adanya motif ekonomi, sosial dan politik yang menjadi faktor utama Belanda begitu mengupayakan untuk mempertahankan kedaulatannya di Jawa Barat. Penulis juga mencantumkan berbagai kebijakan yang diupayakan oleh para birokrat Negara Pasundan dalam menjalankan roda pemerintahan negaranya. Selain dari pada itu, penyusunan skripsi ini juga membahas adanya indikator penting terkait adanya upaya pembubaran pemerintahan Negara Pasundan yang mengakibatkan Negara Pasundan hanya mampu berdiri selama kurang dari dua tahun saja.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bereferensikan dari buku Pengantar Ilmu Sejarah karya Kutowijoyo, yakni dalam penelitian sejarah mempunyai lima metode, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) Heuristik/ pengumpulan sumber, (3) verivikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, (5) dan Historiografi/ penulisan.

1. Pemilihan Topik

Dalam sejarah Indonesia hampir semua masalah merupakan hal baru yang belum ditulis orang. Sehingga untuk menemukan topik permasalahan yang sesuai dan "workable" harus direncakanakan agar dapat dikerjakan dalam waktu yang tersedia dan tidak terlalu luas pembahasannya. Topik sebaiknya dipilih berdasarkan: (1) kedekatan emosional dan (2) kedekatan intelektual.[20]

Kedekatan emosional[21] penulis dalam menyusun karya tulis ini berlandaskan pada rasa ingin tahu penulis dalam mengulik fakta yang sebenarnya terjadi mengapa tokoh masyarakat Jawa Barat dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah Belanda untuk membangun negara baru. Padahal jika dilihat dari sisi historis, Jawa Barat termasuk wilayah yang menggencarkan perlawanannya kepada pemerintah Belanda di masa-masa

[20] Kuntowijoto, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), p: 70.

[21] Kedekatan Emosional adalah pemahaman peneliti akan topik yang dikaji sehingga didapati kemudahan dan perasaan senang dengan penelitian yang dipilihnya tanpa merasa terpaksa. (brainly.co.id)

penjajahan. Sedangkan merujuk pada kedekatan intelektual[22], penulis menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi Belanda sangat bersikukuh dalam menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah pantauan kekuasaannya. Faktor-faktor tersebut tidak lain berasal dari segi perekonomian dan asset yang telah dibangun oleh Pemerintah Belanda di Jawa Barat, sehingga dalam praktiknya Belanda berusaha agar Jawa Barat tetap berada dalam pantauan Pemerintahan Belanda.

2. Heuristik/ Pengumpulan Sumber

Pengumpulan sumber dilakukan untuk mencari keabsahan data dengan melakukan penyaringan secara kritis. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber dari Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI No. 956 hingga Inventaris Arsip Algemeene Secretarie Templaar No. 1221-1224, Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta No. 62 dan beberapa surat kabar yang menjadi catatan atau berita sejaman. Sumber-sumber tersebut didapati penulis dari lembaga penyimpanan Arsip Nasional Republik Indonesia yang berada di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Penulis mengumpulkan sumber berupa surat kabar sejaman yang diterbitkan oleh Berita Indonesia tahun 1947 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berada di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Kemudian sumber-sumber yang sudah terkumpul itu perlu dikaji lebih mendalam baik dari isi

[22] Kedekatan Intelektual adalah penguasaan pengetahuan terhadap literature yang berkaitan dengan topik peneilitian. (brainly.co.id)

sumber yaitu keterkaitan informasi dengan kajian yang sedang dilakukan misalnya kesamaan tempat, waktu, tokoh, dan peristiwa yang sedang dikaji.

3. Verifikasi

Setelah mengetahui secara persis topik dan sumber sudah terkumpul, tahap berikutnya ialah verifikasi, atau kritik sejarah, atau keabsahan sumber.[23] Verifikasi itu ada dua macam: autensitas, atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilatas, atau kebiasaan yang dipercayai atau kritik intern.[24]

Langkah pertama dalam menganalisis keaslian sumber, penulis berupaya melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap sumber primer yang terdapat dalam arsip Nasional dan menguji keakuratan sumber tersebut dalam surat kabar yang sejaman. Setelah mendapat kepastian bahwa sumber itu adalah sumber yang benar, kemudian penulis melakukan kritik intern dengan menyoroti penulis sumber tersebut, sebab dialah yang memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, penulis menyoroti penelitian karya Helius Sjamsuddin, dkk pada judul *Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan* yang bereferensikan pada sumber primer, berupa wawancara terhadap pelaku sejarah dan surat kabar yang sejaman.

---

[23] Kuntowijoto, *Pengantar Ilmu Sejarah...*, p: 72.

[24] Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), p.35.

4. Interpretasi

Interpretasi adalah mengangkat fakta baru dan menafsirkan berbagai fakta yang ada di dalam sumber-sumber.[25] Oleh karena itu setiap peneliti sejarah bisa saja memiliki sintesis yang berbeda meskipun berangkat dari sumber yang sama. Interpretasi sebagai upaya untuk merangkai fakta-fakta agar memiliki bentuk dan struktur. Fakta-fakta tersebut ditafsirkan sehingga ditemukan struktur logisnya. Selain itu, diperlukan landasan yang jelas agar terhindar dari penafsiran yang kurang tepat akibat pemikiran yang sempit.[26] Dalam penyusunan skripsi ini interpretasi diperlukan dan digunakan untuk menyambungkan keterkaitan antara upaya pemerintah Hindia-Belanda dalam mendirikan Negara Pasundan yang dibuktikan dengan keberadaan sumber sejarah seperti arsip dan manuskrip, serta buku-buku kajian terdahulu.

5. Historiografi/ Penulisan

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi disini merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak awal (fase perencanaan) sampai dengan akhirnya penarikan kesimpulan.[27]

---

[25] Kuntowijoto, *Pengantar Ilmu Sejarah...*, p: 75.
[26] Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah...*, p. 37.
[27] Kuntowijoto, *Pengantar Ilmu Sejarah...*, p: 75.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul **Peran Republik Indonesia Dalam Pembubaran Negara Federal Pasundan Di Jawa Barat Tahun 1947-1950.** Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran singkat tentang sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan membahas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. **BAB II** Membahas tentang motif terbentuknya pemerintahan Negara Pasundan dengan frame penulisan yang merujuk pada motif ekonomi, sosial, dan politik dari adanya gerakan federal, serta strategi yang digunakan oleh pemerintah Belanda dalam mengupayakan pembentukan Negara Pasundan. **BAB III** Memuat laporan mengenai tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Negara Pasundan, Struktur dan sistematika pelaksanaan birokrasi aparat pelaksanaan pemerintahan Negara Pasundan, hingga pada kondisi Negara Pasundan pada masa Republik Indonesia Serikat. **BAB IV** Memuat beberapa laporan mengenai faktor-faktor pembubaran Negara Pasundan, faktor-faktor pembubaran Negara Pasundan tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal didapati adanya konflik yang ada pada para aparat birokrasi Negara Pasundan yang lebih mendukung akan kedaulatan republik Indonesia,

sedangkan faktor eksternal dari pembubaran Negara Pasundan tersebut adalah adanya resolusi dari kalangan masyarakat Jawa Barat dalam menolak keberadaan Negara Pasundan hingga ditemukan adanya konflik perebutan wilayah antara DI/TII, APRA, dan TNI pada wilayah Jawa Barat. **BAB V** Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan dan disertai saran-saran.